

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2006 – 2011

Veny Anindya Puspitasari

Email: vpuspitasari@bundamulia

Penulis

Veny Anindya Puspitasari adalah dosen tetap di Program Studi Manajemen Universitas Bunda Mulia dalam rumpun ilmu Ekonomi dan Moneter.

Abstract

Sleman Regency is one regency in Province Yogyakarta Special Region that has the potential as a contributor for Yogyakarta Regional Gross Domestic Bruto and Indonesia Gross Domestic Product. This descriptive quantitative paper will discuss about what the base sectors in Sleman Regency so that worthy to be developed. Location quotation (LQ) method was used to calculate and explain the base sectors in Sleman Regency. The result obtained that base sectors in Sleman in 2010 and 2011 were processing industry, electricity, gas, and clean water, construction, trade, hotel, and restaurants, and financial sector, real estate, company service, and services. Development in these sectors was the impact of Merapi eruption last year that causes huge material losses.

Key Words

Economy Potential, Base Sector, Location Quotation, Sleman Regency

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan dan mempertahankan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dengan memperhatikan pertumbuhan jumlah penduduk dengan memperbaiki struktur ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka membangun

perekonomian suatu negara, pemerintah membuat berbagai kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, mengembangkan struktur perekonomian, dan memperbaiki sistem kelembagaan.

Di era otonomi daerah sekarang ini, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah menyelenggarakan otonomi daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada di daerah dan membentuk kerja sama atau kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Sehingga terdapat suatu penekanan–penekanan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dalam menggunakan potensi sumberdaya alam, kelembagaan dan sumberdaya alam secara lokal atau daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber–sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai-nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perencanaan yang teliti dan evaluasi terhadap hasil–hasil pembangunan yang telah dicapai. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi secara makro adalah statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan pendapatan regional merupakan salah satu indikator yang menggambarkan makin meningkatnya kegiatan ekonomi yang terjadi pada

daerah tersebut. Demikian juga dengan pendapatan perkapita, semakin tinggi pendapatan perkapita maka semakin baik perekonomiannya.

Sektor-sektor ekonomi yang masuk dalam komponen PDRB adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan perusahaan, sektor jasa-jasa. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam rangkaian peningkatan kesejahteraan penduduknya dapat dinilai melalui PDRB.

PDRB merupakan indikator penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa mendatang. Pelaksanaan otonomi daerah dengan pemberdayaan potensi daerah akan bisa berjalan jika sektor basis (sektor unggulan) daerah dapat dioptimalkan. Sektor unggulan ini penting untuk diketahui guna menentukan skala prioritas dalam pembangunan. Sektor basis (sektor unggulan) tersebut adalah sektor yang memiliki potensi yang lebih untuk berkembang dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor basis ini akan menjadi ciri khas di suatu daerah.

Demikian pula dengan Kabupaten Sleman dalam mendukung pertumbuhan ekonominya maka perlu mengidentifikasi sektor-sektor mana yang dapat diunggulkan dan dapat memberikan hasil yang cukup baik dan diharapkan sebagai solusi alternatif, sehingga dapat mendukung sektor-sektor lain yang belum berkembang. Sektor-sektor perekonomian tersebut diambil dari lapangan usaha utama sehingga dapat mendukung pertumbuhan sektor lain yang belum berkembang.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari 5 daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di sisi utara. Wilayah Kabupaten Sleman membentang dari Sungai Opak pada sisi timur sampai Sungai Progo pada sisi barat dan perbatasan Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Gunung Kidul pada sisi selatan, dan pada sisi utara sampai dengan lereng Gunung Merapi yang termasuk 10 besar gunung teraktif di dunia berketinggian 2.968

meter. Dengan posisi tersebut menjadikan Kabupaten Sleman sebagai wilayah hulu dari Propinsi DIY.

Dengan *comparative advantage* yang dimiliki Kabupaten Sleman, menjadikan Sleman sebagai alternatif skala nasional untuk tujuan investasi baik dalam hal pendidikan maupun bisnis bagi masyarakat luar daerah. Hal ini berpengaruh pada demografi Kabupaten Sleman karena banyaknya pendatang dari luar daerah bahkan dari luar negeri. Dalam perkembangannya, Kabupaten Sleman dapat diibaratkan sebagai miniatur Indonesia. Walaupun demikian kehidupan masyarakat Sleman baik penduduk asli maupun pendatang dapat berinteraksi dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai kultur Yogyakarta tanpa meninggalkan kultur budaya masing-masing etnik. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sleman telah mengalami banyak kemajuan dan perubahan, pembangunan ekonomi Kabupaten Sleman telah mampu menciptakan berbagai aktivitas ekonomi dan kenaikan pendapatan masyarakat, dengan tujuan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan hidup masyarakat.

Tabel 1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman
Berdasarkan Harga Konstan

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	924.603	923.422	987.480	1.004.808	1.001.698	1.003.987
Pertambangan dan Penggalian	18.899	32.998	30.372	28.900	33.300	34.810
Industri Pengolahan	873.294	890.912	904.474	921.890	950.030	982.670
Listrik, Gas & Air Bersih	45.439	50.203	52.789	56.070	58.770	62.440
Konstruksi	554.572	601.267	642.538	684.370	729.460	776.230
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1.126.189	1.204.716	1.276.918	1.359.722	1.436.205	1.533.149
Pengangkutan dan Komunikasi	300.628	321.854	339.243	361.360	384.890	408.920
Keu., Real Estat, dan Jasa Perusahaan	539.620	567.159	598.190	631.510	669.290	710.390
Jasa-Jasa	925.816	961.049	1.006.243	1.050.928	1.109.658	1.169.321
Total	5.309.060	5.553.580	5.838.247	6.099.558	6.373.301	6.681.917

Data: Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai tahun

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman yang tertera pada tabel 1 di bawah, terlihat bahwa kontribusi sektor ekonomi Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 didominasi oleh tiga sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Namun demikian, tidak berarti perhatian pemerintah daerah hanya diberikan kepada ketiga sektor unggulan tersebut. Pemerintah daerah perlu memperdalam kembali potensi dari sektor ekonomi baik yang sekarang sudah menjadi sektor unggulan maupun sektor yang berpotensi untuk dikembangkan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memperdalam lagi sektor-sektor potensial di Kabupaten Sleman yang saat ini belum dikembangkan. Dengan demikian bila sektor satu dibangun maka sektor lain juga harus dibangun, ada kendala yang harus dihadapi dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Sleman. Salah satu cara untuk menjalankan pembangunan dengan menentukan sektor basis yang dapat tumbuh dan berkembang cepat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti sektor apa yang menjadi sektor basis yang dapat tumbuh dan berkembang cepat di Kabupaten Sleman.

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas. Menurut akademisi ilmu ekonomi, secara tradisional pembangunan dipandang sebagai suatu fenomena ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perspektif mengenai tujuan dan makna pembangunan kemudian berkembang menjadi lebih luas lagi.

Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, indikator pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDRB maupun

PDRB perkapita tetapi juga indikator lainnya seperti: ketenagakerjaan, pendidikan, distribusi pendapatan, jumlah penduduk miskin. Hal ini sesuai dengan paradigma pembangunan modern yang mulai mengedepankan pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, serta penurunan tingkat pengangguran (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut Rostow pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyebabkan perubahan karakteristik penting suatu masyarakat, misalnya perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Rostow membedakan proses pembangunan menjadi lima tahap yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi (Arsyad, 1999).

Jhinghan (2010) mengajukan beberapa persyaratan pembangunan ekonomi yaitu:

- 1) Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri/daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari masyarakatnya.
- 2) Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan.
- 3) Perubahan struktural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri yang ditandai oleh meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya sektor primer.
- 4) Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi, bahkan disebut sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi.
- 5) Kriteria investasi yang tepat, memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian.

- 6) Persyaratan sosio-budaya. Wawasan sosio budaya serta organisasinya harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan.
- 7) Administrasi. Dibutuhkan alat perlengkapan administratif untuk perencanaan ekonomi dan pembangunan.

Arsyad (1999) mendefinisikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses yang mencakup pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa uang lebih baik, identifikasi pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ditujukan secara utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.

Pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah lebih ditujukan pada urusan peningkatan kualitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang optimal, perluasan tenaga kerja, dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Pertumbuhan harus berjalan secara berdampingan dan terencana dalam upaya terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian maka suatu daerah yang kurang produktif akan menjadi lebih produktif dan berkembang yang pada akhirnya dapat mempercepat proses pertumbuhan itu sendiri.

Todaro dan Smith (2006) mengatakan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang

beberapa tahun selanjutnya dengan sendirinya membawa pertumbuhan angkatan kerja dan ketiga adalah kemajuan teknologi.

Menurut Tarigan (2005), pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu adanya kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan menggambarkan pertambahan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di wilayah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi) dimana pendapatan tersebut diukur dalam nilai riil (dinyatakan dalam harga konstan). Hal ini juga dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh besaran *transfer-payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

1.2 Teori Basis Ekonomi

Perekonomian regional terbagi menjadi dua kegiatan besar, yaitu: kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan perindustrian yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*).

Strategi pembangunan daerah yang muncul didasarkan pada teori ini merupakan penekanan terhadap arti pentingnya bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasinya adalah kebijakan yang mencakup pengurangan hambatan atau batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah itu (Arsyad, 1999).

Menurut Glasson (1977), kegiatan basis adalah kegiatan mengekspor barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan barang dan jasa kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat. Bertambah banyaknya basis di dalam suatu daerah

akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan. Menambah permintaan barang dan jasa akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan, begitu juga sebaliknya. Kegiatan lain yang bukan kegiatan basis disebut sektor nonbasis. Sektor nonbasis ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Oleh karena itu, satu satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan adalah sektor basis (Tarigan, 2005).

Menurut Priyarsono *et al.* (2007), sektor basis atau nonbasis tidak bersifat statis tetapi dinamis sehingga dapat mengalami peningkatan atau bahkan kemunduran dan definisinya dapat bergeser setiap tahun. Adapun sebab-sebab kemajuan sektor basis adalah:

- 1) Perkembangan jaringan komunikasi dan transportasi.
- 2) Perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah.
- 3) Perkembangan teknologi.
- 4) Pengembangan prasarana ekonomi dan sosial.

Sedangkan penyebab kemunduran sektor basis adalah:

- 1) Adanya penurunan permintaan di luar daerah.
- 2) Kehabisan cadangan sumberdaya.

Untuk mengetahui sektor basis dan nonbasis dapat digunakan metode pengukuran langsung maupun tidak langsung. Pada metode pengukuran langsung, penentuan sektor basis dan nonbasis dilakukan melalui survei langsung di daerah yang bersangkutan. Sedangkan pada metode pengukuran tidak langsung, penentuan sektor basis dan nonbasis dilakukan dengan menggunakan data PDB/PDRB dan tenaga kerja per sektor. Berikut penjelasan mengenai kedua metode tersebut.

1) Metode Pengukuran Langsung

Pada metode pengukuran langsung, survei dilakukan terhadap sembilan sektor utama yang terdapat di daerah tersebut. Jika sektor yang disurvei berorientasi ekspor maka sektor tersebut dikelompokkan ke dalam sektor basis dan sebaliknya jika sektor tersebut hanya memiliki pasar pada skala lokal maka sektor tersebut dikategorikan ke dalam sektor nonbasis.

Metode ini mudah untuk dilakukan, namun memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

- a) Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan survei secara langsung tidak sedikit, terutama jika daerah yang disurvei cukup luas.
- b) Umumnya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan survei langsung di suatu daerah.
- c) Membutuhkan banyak tenaga kerja, selain itu tenaga kerja yang melakukan survei harus memiliki *skill* tersendiri dalam mengidentifikasi sektor basis dan nonbasis.

2) Metode Pengukuran Tidak Langsung

Secara umum terdapat tiga metode yang digunakan untuk menentukan basis dan sektor nonbasis di suatu daerah berdasarkan pengukuran tidak langsung, yaitu:

a) Metode Asumsi

Biasanya berdasarkan kondisi di wilayah tersebut (data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan kegiatan basis dan non basis.

b) Metode *Location Quotient* (LQ)

Metode *Location Quotient* (LQ) adalah salah satu metode untuk menentukan sektor basis dan non basis. Dengan dasar pemikiran basis ekonomi, kemampuan suatu sektor dalam suatu daerah dapat dihitung dari rasio antara pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat wilayah terhadap pendapatan (tenaga kerja) total wilayah dengan pendapatan (tenaga kerja) sektor i pada tingkat provinsi terhadap pendapatan (tenaga kerja) provinsi.

c) Metode kombinasi antara pendekatan asumsi dengan metode LQ

Metode kombinasi merupakan kombinasi pendekatan asumsi dengan metode LQ.

d) Metode Pendekatan Kebutuhan Minimum (MPKM)

Metode pendekatan kebutuhan minimum melibatkan penyeleksian sejumlah wilayah yang "sama" dengan wilayah yang diteliti, dengan menggunakan distribusi minimum dari tenaga kerja.

1.3 Definisi Sektor Unggulan

Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan yang tinggi sehingga dijadikan sebagai harapan pembangunan ekonomi. Sektor unggulan diharapkan dapat menjadi tulang punggung dan penggerak perekonomian sehingga dapat menjadi refleksi dari struktur perekonomian suatu wilayah. Secara umum, syarat utama agar suatu sektor layak dijadikan sebagai unggulan perekonomian adalah sektor tersebut memiliki kontribusi yang dominan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Jika dikaitkan dengan pengembangan wilayah, maka penentuan sektor unggulan dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut (Mubyarto, 1989):

- 1) Jumlah tenaga kerja dan sumberdaya lainnya yang dipergunakan atau bisa dipakai secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Kontribusi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pendapatan PDRB.
- 3) Kesesuaian lahan dimana karakter lahan harus disesuaikan dengan karakteristik sektor tersebut dan ketersediannya harus mampu menampung laju pertumbuhan sektor tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dan lokasi penelitian di Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan metode khusus dan jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Data-data tersebut antara lain: PDRB Kabupaten Sleman dan PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Informasi dan data yang diperlukan ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman.

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui sektor basis Kabupaten Sleman berdasarkan pertumbuhan kontribusi tiap sektor digunakan metode analisis *Location Quotient* dengan rumus: (Tarigan, 2007)

$$LQ = \frac{xi/PDRB}{Xi/PNB}$$

Keterangan:

xi = Nilai tambah sektor (i) di Kabupaten Sleman

PDRB = PDRB Kabupaten Sleman

Xi = Nilai tambah sektor (i) di Provinsi DIY

PNB = PDRB DIY

Apabila hasil perhitungan LQ lebih besar dari satu ($LQ > 1$), merupakan sektor basis dan berpotensi untuk ekspor, artinya spesialisasi kota atau kabupaten lebih tinggi dari tingkat provinsi. Dan apabila hasil perhitungan LQ lebih kecil dari satu ($LQ < 1$), merupakan sektor non basis artinya spesialisasi lebih rendah dari tingkat provinsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor basis dari Kabupaten Sleman, dilihat dari perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) pada salah satu sektor menunjukkan hasil lebih dari satu maka sektor tersebut merupakan sektor basis di Kabupaten Sleman. Dan apabila hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) pada salah satu sektor menunjukkan hasil kurang dari satu maka sektor tersebut merupakan sektor non-basis di Kabupaten Sleman.

Tabel 2.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Harga Konstan

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	4.574.160	4.941.800	5.987.742	1.538.639	3.632.680	3.555.800
Pertambangan dan Penggalian	218.170	258.761	292.491	81.954	139.970	156.710
Industri Pengolahan	4.078.210	4.475.680	5.069.409	1.406.850	2.793.580	2.983.170
Listrik, Gas & Air Bersih	375.600	423.370	488.334	143.722	193.030	201.240
Konstruksi	2.866.920	3.470.711	4.075.606	1.186.888	2.040.310	2.187.800
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	5.597.600	6.326.700	7.362.640	2.153.635	4.383.850	4.611.400
Pengangkutan dan Komunikasi	3.050.040	3.318.453	3.730.531	967.107	2.250.660	2.430.700
Keu., Real Estat, dan Jasa Perusahaan	2.755.730	3.188.428	3.712.030	999.570	2.024.370	2.185.220
Jasa-Jasa	5.899.500	6.512.834	7.383.350	2.000.293	3.585.600	3.817.670
Total	29.415.930	32.916.737	38.102.133	10.478.658	21.044.050	22.129.710

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai tahun

Data PDRB Provinsi DIY digunakan untuk menghitung LQ pada Kabupaten Sleman. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa sektor ekonomi yang menjadi unggulan Provinsi DIY dari tahun 2006 hingga 2011 sama seperti sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Sleman pada tahun yang sama, yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan sektor jasa-jasa.

Tabel 3.
Location Quotient Wilayah Kabupaten Sleman dalam Konteks Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	1,12	1,11	1,08	1,12	0,91	0,94
Pertambangan dan Penggalian	0,48	0,75	0,68	0,61	0,78	0,74
Industri Pengolahan	1,19	1,23	1,28	1,29	1,35	1,38
Listrik, Gas & Air Bersih	0,67	0,7	0,71	0,67	1,01	1,03
Konstruksi	1,07	1,07	1,13	1,14	1,42	1,48
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1,11	1,13	1,13	1,08	1,08	1,1

Pengangkutan dan Komunikasi	0,55	0,57	0,59	0,64	0,57	0,56
Keu., Real Estat, dan Jasa Perusahaan	1,08	1,05	1,05	1,08	1,09	1,08
Jasa-Jasa	0,87	0,87	0,89	0,9	1,02	1,01

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perhitungan LQ, pada tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009 yang menjadi sektor basis di Kabupaten Sleman adalah sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan. Pada tahun 2010 dan 2011, sektor basis Kabupaten Sleman mengalami perubahan. Di tahun 2010 dan 2011 yang menjadi sektor basis di Kabupaten Sleman adalah sektor industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor keuangan, real estat, jasa perusahaan, dan jasa-jasa.

Sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan tetap menjadi sektor unggulan pada tahun 2010 dan 2011. Namun, sektor pertanian menjadi sektor non basis di tahun 2010 dan 2011 setelah sebelumnya menjadi sektor basis. Hal ini disebabkan berbagai alasan seperti perubahan iklim yang sulit diprediksi (curah hujan yang berlebih pada awal hingga pertengahan tahun 2010), serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terutama tikus dan wereng coklat, menyebabkan produksi dan produktivitas pertanian menurun. Hal ini juga diperparah adanya erupsi Gunung Merapi diakhir tahun 2010 mengakibatkan rusaknya kawasan pertanian salak pondoh, perkebunan kopi, kelapa serta kawasan hutan rakyat di lereng Gunung Merapi.

Sementara itu, sektor listrik, gas, dan air bersih serta sektor jasa-jasa menjadi sektor unggulan baru bagi Kabupaten Sleman pada tahun 2010 dan 2011. Perkembangan kedua sektor ini tidak lepas dari dampak erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Gunung Merapi membangun daerahnya secara swadaya. Mereka 'menjual' keadaan daerah mereka setelah letusan Merapi itu. Wisatawan asing maupun mancanegara banyak yang

berkunjung ke daerah di sekitar Gunung Merapi untuk menyaksikan secara langsung dampak dari letusan Merapi dan kenangan yang tersisa dari seorang juru kunci Merapi yang sangat terkenal, yaitu Mbah Maridjan. Mbah Maridjan juga turut menjadi korban pada saat Merapi memuntahkan laharnya. Peningkatan kunjungan wisatawan ini membawa efek domino pada perkembangan berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Sleman.

KESIMPULAN DAN SARAN

1.4 Kesimpulan

Kabupaten Sleman sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki potensi ekonomi skala nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai beberapa sektor basis atau sektor unggulan. Pada tahun 2006 hingga 2009, sektor pertanian mendominasi basis ekonomi di Kabupaten Sleman. Akan tetapi, bencana meletusnya Gunung Merapi menyebabkan sektor ini mengalami penurunan dalam perkembangannya.

Pada tahun 2010 dan 2011 yang menjadi sektor unggulan adalah sektor industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor keuangan, real estat, jasa perusahaan, dan jasa-jasa. Sektor-sektor ini meningkat seiring berkembangnya daerah di sekitar Gunung Merapi menjadi lokasi tujuan wisata baik bagi wisatawan asing maupun mancanegara.

1.5 Saran

Letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 lalu selain membawa berbagai kerugian juga membawa dampak positif. Banyak sektor ekonomi yang berkembang, salah satunya ada sektor jasa. Kunjungan wisatawan yang ingin melihat sisa-sisa letusan Gunung Merapi berpotensi meningkatkan pendapatan daerah. Akan tetapi, pengembangan di daerah sekitar Gunung Merapi masih bersifat swadaya. Akan lebih baik jika Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman membuat suatu kebijakan pengembangan pariwisata berbasis komunitas

sehingga dapat lebih memberikan manfaat baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah* Edisi Pertama. BPFE: Yogyakarta.
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* Edisi ke-16. PT Raja Grafindo.
- Glasson, J. (1977). *Pengantar Perencanaan Regional*. Paul Sihotang [penerjemah]. Program Perencanaan Nasional FEUI-Bappenas. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mubyarto. (1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES: Jakarta.
- Priyarsono, D.S., Sahara, dan M. Firdaus. (2007). *Ekonomi Regional*. Universitas Terbuka: Jakarta.
- Tarigan, Robinson. (2005). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* Edisi Revisi. Bumi Aksara: Jakarta.
- Tarigan, Robinson. (2007). *Ekonomi Regional*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Todaro dan Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi* Edisi Kesembilan. Erlangga: Jakarta.
- <https://www.slemankab.bps.go.id>